



**DUTA BESAR REPUBLIK INDONESIA
BRATISLAVA**

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: /ADM/VII/2015**

**T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA KBRI BRATISLAVA TAHUN 2015-2019**

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat kinerja, mempertajam misi, dan meningkatkan akuntabilitas Perwakilan RI di luar negeri sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang tata kelola pemerintahan, maka dipandang perlu menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KBRI Bratislava;
 - b. bahwa tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas publik dan terwujudnya "*good governance*", memerlukan Indikator Kinerja Utama yang lebih spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dengan kurun waktu pencapaian yang jelas;
 - c. bahwa dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Perwakilan RI
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
16. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 01/B/RO/IV/2015/01 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KBRI BRATISLAVA TAHUN 2015-2019.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama KBRI Bratislava sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Perwakilan RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, digunakan untuk:
- a. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran KBRI Bratislava;
 - b. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) KBRI Bratislava;
 - c. Menyusun *e-monev* KBRI Bratislava;
 - d. Menyusun Laporan Kinerja (LKj) KBRI Bratislava; dan
 - e. Mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KBRI Bratislava.

- KETIGA : Apabila terjadi perubahan visi, misi, sasaran, dan tujuan organisasi yang baru maka akan ditetapkan indikator kinerja utama yang baru.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bratislava
Pada tanggal : Juli 2015

Kepala Perwakilan Republik Indonesia,



Djumantoro Purbo
Duta Besar RI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: /ADM/VII/2015

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KBRI
BRATISLAVA TAHUN 2015-2019**

1. Nama Organisasi : Perwakilan RI di Bratislava
2. Tugas : Mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan pemerintah Republik Indonesia serta melindungi Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, melalui pelaksanaan hubungan diplomatik dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional, sesuai dengan kebijakan politik dan hubungan luar negeri pemerintah Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.
3. Fungsi :
 - a. Peningkatan dan pengembangan kerjasama politik dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya dengan negara penerima dan/atau organisasi internasional;
 - b. Peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama WNI di luar negeri;
 - c. Pengayoman, pelayanan, perlindungan dan pemberian bantuan hukum dan fisik kepada WNI dan BHI, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di negara penerima, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional
 - d. Pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi di Negara penerima;
 - e. Konsuler dan Protokol;
 - f. Peningkatan hubungan perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan
 - g. Perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan pemerintah RI dengan Negara penerima
 - h. Kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal perwakilan, komunikasi dan persandian

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya dukungan negara Slovakia terhadap kedaulatan NKRI/Pembangunan infrastruktur kemaritiman/kerjasama bilateral dan isu-isu global	<p>Persentase rekomendasi hasil kajian komprehensif Perwakilan RI yang ditindaklanjuti <i>Stakeholders</i></p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi: usulan atau saran strategis mengenai isu-isu tertentu yang menjadi kepentingan Nasional dan sejalan dengan sasaran strategis Kemlu - Kajian Komprehensif: analisa mendalam mengenai isu-isu tertentu terkait kepentingan Nasional dengan disertai dukungan data/informasi yang telah ditelaah dengan baik - Catatan: penekanan kepada current strategic issue - Ditindaklanjuti: memproses lebih lanjut rekomendasi yang disampaikan agar memiliki nilai manfaat terhadap kepentingan 	<p>Formulasi Pengukuran:</p> <p>(Jumlah Rata-rata Rekomendasi yang ditindaklanjuti <i>stakeholders</i>/ Jumlah Rekomendasi yang disampaikan selama satu tahun) X 100%</p> <p>Catatan: Rekomendasi yang ditindaklanjuti baik oleh Kemlu ataupun di luar Kemlu tetap dihitung sebagai satu rekomendasi yang ditindaklanjuti</p> <p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan - Nota Diplomatik - Copy pernyataan atau pemberitaan massa - Copy dokumen MoU atau kesepakatan bilateral - Foto-foto kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendekatan (lobby) kepada stakeholders terkait di negara akreditasi dalam mendukung penyusunan rekomendasi b. Mengembangkan jejaring kerja (<i>networking</i>) dalam mendukung penyusunan rekomendasi. c. Menyusun laporan/kajian hasil kunjungan pejabat tinggi/menteri d. Menyampaikan usulan/prakarsa di bidang politik, hukum, dan keamanan untuk posisi indonesia dalam negosiasi/perundingan bilateral 	Fungsi Politik dan Protkons, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pensosbud

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
		Indonesia, baik dalam bentuk surat, rencana aksi atau hasil/proyek konkrit <i>Stakeholders</i> : Kemlu dan di luar Kemlu (KADIN, K/L terkait)			
2	Peningkatan peran KBRI Bratislava dalam mendukung peningkatan pengaruh Indonesia di negara akreditasi	Persentase realisasi rencana aksi sebagai implementasi dari perjanjian/ kesepakatan Penjelasan: - Rencana aksi: Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dari perjanjian/kesepakatan - Implementasi: Langkah nyata sebagai tindak lanjut dari rencana aksi yang telah ditetapkan Perjanjian/kesepakatan: naskah tertulis yang memuat persetujuan diantara para pihak dari Indonesia dan negara mitra/akreditasi	Formulasi Pengukuran: (Jumlah rencana aksi yang direalisasikan sebagai implementasi perjanjian/kesepakatan/ Jumlah rencana aksi yang disusun) X 100% Sumber Data: - Laporan - Nota Diplomatik - Copy pernyataan atau pemberitaan massa - Copy dokumen MoU atau kesepakatan bilateral - Foto-foto kegiatan	a. Menyusun rencana aksi tidak lanjut komitmen hasil kunjungan Kepala Negara/Kepala Pemerintah/Menteri dan pejabat tinggi negara b. Merealisasikan rencana aksi sebagai implementasi perjanjian/kesepakatan di bidang politik, hukum dan keamanan yang ditandatangani c. Mengupayakan dukungan <i>stakeholders</i> di negara akreditasi terhadap kedaulatan NKRI dan/atau pernyataan tidak mengakui gerakan-gerakan separatis d. Melakukan upaya penggalangan terhadap pencalonan Indonesia pada lembaga atau organisasi internasional	Fungsi Politik dan Protkons, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pensosbud
3	Peningkatan peran KBRI Bratislava menciptakan nilai manfaat ekonomi, dan pembangunan bagi	Persentase peningkatan <i>trade, tourism, and investment</i> (TTI)	Formulasi Pengukuran: Persentase peningkatan perdagangan + Persentase	a. Memfasilitasi kunjungan Menteri/pejabat tinggi yang terkait dengan isu ekonomi b. Mengupayakan peningkatan	Fungsi Ekonomi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
	kesejahteraan rakyat Indonesia	Penjelasan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan : nilai tambahan/kenaikan dibandingkan <i>baseline</i> - Baseline : tahun dasar yang dijadikan acuan perhitungan dalam satu periode Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), misal tahun 2014 untuk perencanaan 2015-2019 dengan asumsi kondisi tahun 2014 tidak terdapat fluktuasi data yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya * catatan: sekiranya pada tahun 2014 terdapat fluktuasi data yang signifikan maka dapat menggunakan pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir 2009-2014 - <i>Trade</i>: transaksi ekspor – impor produk komersial antara Indonesia dengan negara mitra - <i>Tourism</i>: jumlah wisatawan negara setempat yang berkunjung ke Indonesia - <i>Investment</i>: nilai investasi asing dalam bentuk penanaman modal 	peningkatan tourism + Persentase peningkatan investasi / 3 Catatan: 1. Persentase peningkatan perdagangan: Nilai perdagangan tahun berjalan/ baseline nilai perdagangan 2. Persentase peningkatan tourism: Jumlah wisatawan dari negara setempat yang berkunjung ke Indonesia/baseline jumlah wisatawan 3. Persentase peningkatan Investasi: Nilai Investasi tahun berjalan/ baseline nilai investasi 4. Perwakilan dapat memilih/menyesuaikan komponen TTI sesuai dengan kondisi di Negara akreditasi (dapat ketiganya /dua/satu) Sumber data: <ul style="list-style-type: none"> - Statistik Neraca Perdagangan Bilateral dan atau nilai kesepakatan transaksi bisnis - Statistik kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia 	kunjungan misi dagang/pengusaha yang berhasil didatangkan Perwakilan RI c. Menindaklanjuti kesepakatan ekonomi yang dihasilkan. (kesepakatan ekonomi dapat berupa penandatanganan MoU/perjanjian, komitmen investasi dan perdagangan) d. Menyelesaikan sengketa/kasus bisnis yang terjadi e. Memfasilitasi business matchmaking f. Menyusun data <i>economic intelligence</i> untuk kepentingan <i>stakeholders</i> g. Menindaklanjuti inquiry bisnis (perdagangan) h. Menindaklanjuti minat investasi pengusaha di negara akreditasi dan sebaliknya i. Mengupayakan kunjungan wisatawan dari negara akreditasi ke Indonesia j. Mengembangkan jejaring kerja dalam mendukung peningkatan TTI	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
		<p>langsung di Indonesia dan atau sebaliknya nilai investasi dari Indonesia ke Negara setempat</p>	<p>dan atau jumlah visa yang dikeluarkan Perwakilan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statistik PMA dan atau nilai investasi/jumlah perusahaan Indonesia atau perusahaan asing yang difasilitasi Perwakilan RI untuk melakukan kegiatan investasi 		
4	<p>Menguatnya peran <i>soft power</i> diplomasi yang dilakukan oleh KBRI di Bratislava</p>	<p>Persentase publik di Bratislava yang berpandangan positif terhadap Indonesia</p> <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publik: masyarakat (WNI dan WNA) di negara akreditasi baik yang bersifat perorangan maupun organisasi - Pandangan Positif: Pandangan masyarakat yang memberikan nilai baik/mendukung terhadap Indonesia 	<p>Formulasi Pengukuran: (Jumlah pandangan positif/(jumlah kuesioner yang diterima) X 100%</p> <p>Sumber Data: Tabulasi data survei pandangan publik di negara akreditasi</p> <p>Catatan: Komponen yang akan disurvei adalah yang terkait dengan penguatan <i>soft power diplomacy</i> pada saat dilangsungkannya kegiatan oleh Perwakilan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Membina dan memberdayakan masyarakat Indonesia di negara akreditasi. b. Meningkatkan kualitas pengelolaan <i>website</i> atau portal perwakilan untuk menarik minat pengunjung mengakses informasi tentang Indonesia c. Memberdayakan keberadaan para peserta program beasiswa/pelatihan di negara akreditasi dalam mendukung kegiatan Perwakilan RI d. Membangun <i>networking</i> untuk mendukung penguatan <i>soft power diplomacy</i> di negara akreditasi e. Mengupayakan kunjungan Menteri/pejabat tinggi yang terkait dengan isu Pensosbud f. Mengupayakan tindak lanjut kesepakatan/kerjasama (pertukaran 	<p>Fungsi Pensosbud</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
				mahasiswa/pelajar) di bidang penerangan, sosial dan budaya g. Menyelenggarakan Misi Kesenian/Kebudayaan h. Memfasilitasi aktivitas/prakarsa/program diaspora Indonesia.	
5	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI serta pemberdayaan diaspora di Bratislava	Persentase responden atau pengguna jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Penjelasan: - Permasalahan: kasus-kasus WNI/BHI yang terjadi di Perwakilan yang mencakup kasus pidana, kasus perdata, kasus ketenagakerjaan, kasus keimigrasian, dan kasus-kasus khusus (<i>high profile cases</i>) -Diselesaikan: menindaklanjuti kasus yang terjadi hingga hak hukumnya terpenuhi atau ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap	Formulasi Pengukuran: (Jumlah pernyataan puas/(jumlah kuesioner yang diterima) X 100% Sumber Data: Tabulasi data survei kepuasan secara elektronik	a. Melakukan survei kepuasan pelayanan kekonsuleran	Perwakilan Diplomatik Bilateral dan Perwakilan Konsuler Fungsi Protkons

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran/Sumber Data	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
			Administratif		
7	Meningkatnya penerapan manajemen kinerja dan anggaran yang akuntabel	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan yang dilakukan Itjen dan BPO	Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perwakilan dari Itjen dan BPO	Mengimplementasikan sistem AKIP sesuai pedoman	Semua Fungsi + BPKRT
8		Persentase Realisasi Anggaran (SP2D) terhadap Alokasi DIPA Perwakilan	Formulasi Pengukuran: (Realisasi Anggaran (SP2D)/ Alokasi DIPA Perwakilan) x 100% Sumber Data: SP2D dari KPPN / OMSPAN DIPA Perwakilan	Merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan kinerja dan anggaran	Semua Fungsi + BPKRT